HISTORISISME BARU DAN KESADARAN DEKONSTRUKTIF: KAJIAN KRITIS TERHADAP HISTORIOGRAFI INDONESIASENTRIS*

*Bambang Purwanto**

1. Antara Fakta dan Fiksi

Ketika sastra dan sejarah dibicarakan secara bersama-sama, segera muncul pertanyaan, apakah ada fiksi di dalam sejarah dan apakah ada fakta di dalam sastra? Bagi sebagian orang, pertanyaan itu mungkin kedengaran agak aneh dan seolah-olah hanya dibuat-buat karena secara umum sastra selalu dikaitkan dengan fiksi, sedangkan sejarah tidak dapat dipisahkan dari fakta masa lalu. Hal itu berarti bahwa pertanyaan di atas tidak memerlukan jawaban. Akan tetapi, persoalan menjadi lain, ketika perbincangan tentang sastra dan sejarah memasuki dunia wacana dekonstruktif di samping rekonstruktif. Sebagai sebuah realitas, sejarah dan sastra sering dianggap berada dalam tataran yang sama. Fiksi dan fakta tidak dapat begitu saja secara kaku diasosiasikan hanya dengan salah satu di antara keduanya, yaitu hanya berkaitan dengan sastra atau hanya dengan sejarah.

Bagi mereka yang menyangsikan kemampuan bahasa sebagai media yang dapat merepresentasi bukti-bukti material dari sesuatu yang terjadi pada masa lalu, dua pertanyaan di atas tentu saja tidak terlalu dihiraukan. Menurut pendapat itu, pada tataran praktis antara fakta dan fiksi tidak ada perbedaan yang berarti secara tekstual sehingga sastra dan sejarah dapat diasosiasikan bergulat di dalam satu bidang yang sama, yaitu bahasa. Hal ini sejalan dengan pendapat para pendukung pascastrukturalisme melalui *linguistic turn*-nya, yang menyatakan bahwa bahasa dalam bentuk budaya dan intelektual merupakan media pertukaran bagi hubungan antarkekuatan dan konstitutor terakhir dari kebenaran dalam penulisan dan pemahaman tentang masa lalu. Sejarah sebagai sebuah pengetahuan sangat tergantung pada wacana dan bentuk representasi antarteks pada konteks sosial dan institusional yang lebih luas di dalam atau melalui bahasa karena realitas objektif masa lalu telah berjarak dengan sejarah sebagai ilmu. Dalam konteks ini, sejarah sebagai ilmu tidak dapat disebutkan sebagai representasi langsung dari objektivitas

---

* Naskah asli tulisan ini adalah makalah yang disampaikan pada "Seminar Historisisme Baru" yang diselenggarakan oleh Bagian Teori dan Kritikan Sastera, Jabatan Sastera, Dewan Bahasa dan Pustaka Malaysia pada Oktober 2000. Penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta seminar yang telah memberikan kritik dan masukan yang berguna bagi perbaikan artikel ini.

* Doktor, Master of Art, staf pengajar Jurusan Sejarah, Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada.

masa lalu karena jarak itu telah mereduksi secara langsung kamampuan rekonstruktifnya.

Berdasarkan cara berpikir di atas, sejarah sebagai kenyataan hanya merupakan sesuatu yang terjadi satu kali pada masa lalu dan tidak berulang, sedangkan sejarah sebagai sebuah rekonstruksi tertulis dan lisan yang kita kenal saat ini adalah produk dari bahasa, wacana, dan pengalaman sesuai dengan konteksnya. Hal itu berarti bahwa sebagai sebuah realitas, sejarah hanya ada pada masa lalu dan tidak mungkin dapat dijangkau oleh sejarawan. Rekonstruksi sejarah adalah produk subjektif dari sebuah proses pemahaman intelektual yang dilambangkan dalam simbol-simbol kebahasaan atau naratif dan dapat berubah dari waktu ke waktu, dari satu tempat ke tempat yang lain, atau dari satu orang ke orang yang lain. Sementara itu, pada saat yang sama sastra berhasil menampilkan citra dirinya sejajar sebagai sejarah karena mampu menghadirkan situasi faktual dari masa lalu sebagai sebuah narasi melalui imajinasi kebahasaannya. Hal itu berarti bahwa kebenaran sejarah maupun sastra adalah kebenaran relatif. Demikian juga tidak ada kebenaran absolut yang dapat ditemukan sehingga tidak selalu diperlukan teori penjelasan yang dapat diverifikasi melalui pengujian empirik. Bagi para sejarawan konvensional yang sangat percaya pada adanya kebenaran sejarah mutlak, hal itu tentu saja akan menimbulkan masalah pada tataran epistimologi.

Pada tingkat teoretik dalam pengertian teori sejarah konseptual, adanya perbedaan itu sebenarnya bukanlah sesuatu yang baru dalam ilmu sejarah. Para pendukung positivisme atau empirisisme dan idealisme atau relativistisme telah bersilang pendapat sejak lama, baik tentang arti, pemahaman, eksplanasi, objektivitas-subjektivitas maupun faktor-faktor determinan dalam sejarah, dan hal serupa terjadi ketika tradisi hermeneutika, historisisme baru, dan pascamodernisme menolak kepastian masa lalu yang ditawarkan oleh para pendukung modernisme. Dalam bahasa Stephen Greenblatt yang dianggap sebagai pioner historisisme baru, "historisisme lama dianggap bersifat monologis, hanya tertarik untuk menemukan visi politik tunggal, percaya bahwa sejarah bukan hasil interpretasi sejarawan, dan dianggap sebagai hasil kepentingan kelompok sosial tertentu dalam pertentangannya dengan kelompok lain".

Para dekonstruksionis itu tidak hanya tidak percaya kepada tradisi atau kepastian sejarah, melainkan juga kepada segala interpretasi yang tidak mendukung bahwa sejarah sebagai sesuatu yang berasal dari masa lalu yang bersifat relatif karena ia sekaligus merupakan sejarah masa kini. Kekinian itu bersama-sama dengan masa lalu merupakan representasi ideologis sehingga selalu muncul pertanyaan tentang bagaimana sebuah rekonstruksi sejarah bercerita tentang masa lalu itu sendiri. Bahkan, pada tingkat tekstual, keberadaan teks sebagai informasi dasar atau data tentang masa lalu dianggap tidak selalu dapat mewakili sejarah dalam arti objektif. Masa lalu yang dipelajari itu dianggap sebagai produk interpretasi naratif dan eksplanasi dari manusia yang tidak terbebas dari personalitas yang kontradiktif dan ambivalen, yang juga membaca dan menginterpretasi sejarah sebagai teks dengan cara yang berbeda-beda.

Dalam perkembangan ilmu sejarah, pembahasan tentang persoalan fakta dan fiksi ini sebenarnya bukan sesuatu yang sederhana. Eric Hobsbawm yang sering dianggap berseberangan dengan para pendukung pascamodernisme berpendapat, "ideologisasi dan mitologisasi sejarah yang menjadi dasar dari subjektivitas sejarah dibangun tidak didasarkan pada kebohongan atau fiksi melainkan karena anakronisme", walaupun sebagian besar sejarawan masih tetap berpendapat bahwa hal itu lebih banyak disebabkan oleh kekeliruan atau kesengajaan. Hal itu terjadi karena interpretasi terhadap fakta sejarah dalam proses rekonstruksi dilakukan tidak sesuai dengan kenyataan struktural dan kultural yang melingkupinya pada waktu sebuah peristiwa terjadi. Menurut Hobsbawm, apa yang diteliti oleh sejarawan adalah riil sehingga ia menolak pendapat yang menyatakan bahwa realitas objektif itu tidak dapat ditemukan. Ia lebih lanjut mengatakan, "terdapat perbedaan yang sangat mendasar antara fakta dan fiksi serta antara pernyataan sejarah yang didasarkan atas bukti dan pernyataan literer yang tidak didasarkan atas bukti",

ketika masa lalu direkonstruksi hanya di dalam pikiran, bukan sebagai realitas.

Hal itu juga tampaknya mendorong George G. Iggers akhirnya berpendapat bahwa pendekatan linguistik dari pasca-strukturalisme atau pendekatan sosial-kultural dari historisisme baru lebih cocok bagi kritik sastra daripada penulisan sejarah, biarpun ia tetap menyadari arti penting faktor kultural dalam merekonstruksi masa lalu seperti yang dikatakan oleh Joan W. Scott dan Lynn Hunt. Menyitir pendapat Carroll Smith-Rosenberg, Iggers lebih jauh mengatakan bahwa "para sejarawan akan lebih setuju terhadap pendapat yang menyatakan bahwa linguistik membedakan struktur masyarakat dan perbedaan sosial menstrukturkan bahasa sebagai salah satu fakta di dalam sejarah umat manusia", daripada pendapat yang menyatakan bahwa realitas sejarah tidak pernah ada dan yang ada hanya bahasa yang berbentuk naratif sebagai representasi masa lalu.

Perdebatan di atas tentu saja menimbulkan pertanyaan tentang relevansi historisisme baru bagi pengkajian sejarah. Bagi para sejarawan seperti Lawrence Stone, historisisme baru tentu saja merupakan ancaman bagi tradisi pengkajian sejarah secara konvensional karena mengesampingkan *actual historical past* dalam penulisan sejarah. Namun, bagi Alun Munslow historisisme baru sama dengan sejarah dekonstruktif karena merupakan tantangan bagi paradigma empirik. Berbeda dengan pemahaman konseptual yang didasarkan pada pemikiran awal Jacques Derrida atau Michel Foucault yang menjadi dasar bagi sebagian besar teori sejarah pascamodernisme, kesadaran dekonstruktif menurut Alun Munslow tetap didasarkan pada fakta biarpun ia beranggapan bahwa sejarah tidak akan ada bagi para pembaca sampai sejarawan menulisnya sebagai sebuah naratif. Realitas masa lalu adalah laporan tertulis, bukan hanya sekedar masa lalu sebagaimana yang terjadi. Oleh sebab itu, bagi Manslow, "sejarah tidak hanya sekedar pengkajian tentang perubahan dalam konteks waktu melainkan sejarah merupakan pengkajian tentang informasi atau pengetahuan yang dihasilkan oleh sejarawan".

Secara naratif, hanya sejarawan yang menghasilkan masa lalu, sedangkan masa lalu itu sendiri terkurung dalam dimensi waktu dan ruangnya tanpa dapat dijangkau secara fisik. Selain itu, Jorn Rusen mengatakan bahwa "kebenaran sejarah sebagai sebuah naratif baru akan masuk akal jika didukung tidak hanya oleh validitas empiris melainkan juga valitidas normatif". Dalam konteks rasionalitas metodologis sekalipun, berbicara tentang netralitas di dalam rekonstruksi sejarah adalah sesuatu yang sia-sia. Oleh sebab itu, seperti kebanyakan para relativistis pada masa lalu, Rusen mengatakan bahwa "*neutrality is the end of history*".

Terlepas dari perbedaan di atas yang menyangkut tuntutan terhadap kebenaran empirik dan komitmen terhadap intersubjektivitas pada rekonstruksi masa lalu, pada tingkat metodologis, historisisme baru telah mendorong munculnya kesadaran dekonstruktif bahwa kehidupan sehari-hari juga merupakan bagian yang integral dari proses sejarah. Pengkajian sejarah mulai bergerak dari sejarah makro yang didasarkan pada tradisi pendekatan ilmu-ilmu sosial menjadi sejarah mikro yang didasarkan pada pengalaman kehidupan sehari-hari orang kebanyakan. Jika sejarah yang didasarkan pada pendekatan ilmu-ilmu sosial menghalangi aspek kualitatif dari masa lalu, sejarah mikro menampilkan wajah manusiawi dari masa lalu. Menurut pendapat ini, sejarah struktural yang hanya terpaku pada pendekatan ilmu-ilmu sosial gagal merekonstruksi dan memahami aspek kemanusiaan dari fakta-fakta sejarah yang ada. Akibatnya, sejarah hanya dijelaskan sebagai realitas hubungan antara struktur yang rasional dan logis, sebaliknya mengesampingkan sejarah sebagai hasil dari tindakan atau perilaku manusia yang tidak selalu seragam, rasional, dan logis.

Akan tetapi, bagi Georg G. Iggers dan beberapa penulis lain yang bersikap kritis terhadap tradisi sejarah mikro ini, walaupun tetap mendukung ide-ide dasarnya, para pendukung teori sejarah pascamodernisme dianggap tetap saja menggunakan prinsip-prinsip ilmu-ilmu sosial ketika mencoba memulihkan subjektivitas dan individualitas dari persoalan yang dihadapi. Sejarah mikro dianggap "bukan sebagai alternatif untuk menganalisis proses sosial dan politik yang berskala besar, tetapi hanya sebagai

suplemen yang diperlukan". Para pengkritik tradisi sejarah mikro lebih lanjut mengatakan bahwa "secara metodis sejarah mikro telah mereduksi sejarah menjadi antikuarianisme anekdotal, meromantisasi budaya masa lalu, tidak mampu menjelaskan dunia modern serta kontemporer yang ditandai oleh perubahan yang cepat, dan dianggap tidak mampu menjelaskan persoalan politik".

Pada tataran seperti yang telah disebutkan di atas, pernyataan Eric Hobsbawm tentang "perlu dilakukannya pembedaan antara apa yang ada dengan apa yang tidak ada untuk menentukan ada tidaknya sejarah tampaknya akan menjembatani persoalan fakta dan fiksi dalam rekonstruksi masa lalu". Sejarah sebagai representasi kenyataan masa lalu tidak hanya ditentukan oleh bahasa karena naratif yang merupakan produk dari bahasa hanya akan ada jika terdapat realitas di masa lalu itu, yang dalam hal tertentu kadang-kadang disebut sebagai pengalaman. Keberadaan peristiwa sebagai suatu bukti empirik akan menjadi penting untuk memungkinkan munculnya validitas naratif pada setiap rekonstruksi yang dilakukan terhadap masa lalu.

Secara historis, keberadan kesadaran dekonstruktif itu kemudian berkaitan erat dengan perkembangan historiografi pascakolonial dan feminisme, yang berusaha melakukan perubahan secara struktural dalam melihat keseluruhan proses sejarah sebagai sesuatu yang lebih kongkret. Menurut Kathleen Canning, keberadaan historiografi pascakolonial dan feminisme merupakan dua ciri penting dari proses dekonstruksi wacana dan pengalaman yang berkaitan dengan historisisme baru. Berdasarkan kenyataan itu, tulisan ini akan difokuskan pada persoalan kesadaran dekonstruktif dalam penulisan sejarah Indonesia berkaitan dengan perkembangan historiografi pascakolonial di Indonesia. Tulisan ini berusaha untuk melihat sejauh manakah ide-ide historisisme baru dapat dicari akarnya pada historiografi Indonesia karena landasan filosofis historiografi pascakolonial menjadi dasar pemikiran yang paling berpengaruh dalam tradisi penulisan sejarah Indonesia sampai saat ini.

Kemerdekaan politik yang dicapai pada tahun 1945 telah mendorong sejarawan Indonesia membaca dan menulis kembali sejarah Indonesia dengan label indonesiasentris, terutama sejak tahun 1950-an. Di samping munculnya optimisme baru untuk menulis sejarah yang kurang subjektif, sejak awal Soedjatmoko dan Mohammad Ali yang banyak menaruh perhatian pada persoalan-persoalan metodologis dalam sejarah Indonesia telah mengkhawatirkan akan munculnya sebuah dekolonisasi historiografis dalam proses perkembangan historiografi Indonesia baru pascaskolonial. Apakah kekhawatiran itu terbukti?

2. Perkembangan Tanpa Perubahan secara Struktural

Tahun 1957 merupakan tonggak penting dalam perkembangan historiografi Indonesia, ketika disusun sebuah rumusan baru tentang landasan filosofis penulisan sejarah Indonesia. Penyusunan konsep dasar yang dikenal sebagai indonesiasentris itu merupakan reaksi terhadap tradisi historiografi kolonial, Belanda, atau Eropa yang mengecilkan arti masyarakat Indonesia dalam proses sejarahnya sendiri. Secara teoretik dan filosofis, di dalam tradisi indonesiasentris sejarah Indonesia dipahami dari dalam yang berorientasi pada masyarakat Indonesia sebagai sebuah keutuhan bangsa. Keberadaan historiografi nasional ini tidak dapat dipisahkan dari kebutuhan untuk menentukan identitas bangsa. Dalam perkembangan kemudian di dunia akademik, tradisi indonesiasentris itu dikembangkan bersama-sama dengan tradisi pendekatan ilmu-ilmu sosial dalam historiografi Indonesia. Namun, apakah persoalan intersubjektivitas yang menjadi ciri penting dari historiografi kolonial dapat diatasi oleh historiografi pascakolonial yang indonesiasentris itu?

Sejak awal perkembangannya, historiografi indonesiasentris ternyata cenderung menjauh dari sejarah objektif karena berkembangnya prinsip dekolonisasi historiografis yang bersifat ultranasionalis dan lebih mementingkan retorika. Hal itu terutama tercermin di dalam karya generasi-generasi awal sejarawan Indonesia pascakolonial, seperti M. Yamin, Soekanto, dan Sanusi Pane. Dalam karyanya tentang enam ribu tahun sang merah putih, M. Yamin dengan

gaya bahasa yang berapi-api mencoba meyakinkan bangsa Indonesia bahwa sejarah bendera nasional Indonesia merah putih telah berakar jauh ke belakang sejak enam ribu tahun yang lalu. Berbagai penafsiran atas warna yang ditemukan pada masyarakat Indonesia pada masa purba sampai kebiasaan tradisional bubur merah dan putih dijadikan dasar untuk menjelaskan eksistensi dan kesakralan dari arti simbolis warna merah dan putih pada bendera nasional itu. Pemahaman sejarah yang sama juga dapat dilihat dalam karya M. Yamin yang lain tentang perang Diponegoro. Karya Soekanto tentang Sentot alias Alibasah Abdulmustopo Prawirodirjo seorang senopati Pangeran Diponegoro juga dapat disejajarkan dengan karya M. Yamin tentang maha patih Gajah Mada dengan sumpah palapanya dan tentang Pangeran Diponegoro. Sentot seperti juga Gajah Mada, Pangeran Diponegoro, dan Sentot digambarkan sebagai tokoh yang sempurna, pahlawan yang telah berjasa dalam usaha mempersatukan bangsa dan perjuangan nasional Indonesia, tanpa perlu melihat konteks waktu dan ruang dari peristiwa-peristiwa itu.

Di dalam konteks metodologis yang merujuk pada wacana dasar para relativis, karya-karya itu sebenarnya telah merekonstruksi sejarah berdasarkan interpretasi kekinian, yaitu jiwa zaman yang berkembang pada waktu itu yang menitikberatkan pada nasionalisme, patriotisme, dan revolusi Indonesia yang terus berlangsung. Namun, satu hal yang perlu dicatat bahwa dekolonisasi historiografi itu dalam kenyataannya lebih mementingkan ideologisasi terhadap masa lalu daripada merekonstruksi kebenaran sejarah. Akibatnya, keberadaan validitas normatif seperti yang disyaratkan oleh Jorn Rusen dalam kebenaran naratif tidak didukung oleh validitas empirik. Di samping itu, ada satu hal lagi yang perlu dicatat, dalam perkembangan ilmu sejarah adanya kecenderungan untuk mementingkan retorika dalam rekonstruksi sejarah merupakan strategi konfermasi yang dilakukan pada periode yang dikenal dalam perkembangan historiografi sebagai periode pramodern, yaitu ketika tradisi penelitian sejarah belum digantikan oleh metodologi rasional.

Secara singkat dapat dikatakan bahwa seolah-olah segala sesuatu yang baik dalam pandangan historiografi kolonial menjadi buruk dalam historiografi indonesiasentris, tetapi ironisnya wacana kolonial tidak pernah hilang dari historiografi Indonesia pascakolonial. Biarpun ada yang beranggapan bahwa melalui indonesiasentris telah terjadi reinterpretasi terhadap kolonialisme, dalam kenyataannya wacana kolonial tetap menjadi faktor dominan dalam narasi faktual. Segala sesuatu yang terjadi dalam sejarah Indonesia dianggap sebagai produk dari kolonialisme, padahal secara kontekstual kolonialisme sama dengan kemerdekaan, yaitu hanya merupakan representasi waktu dalam proses dan struktur sejarah Indonesia.

Oleh sebab itu, biarpun generasi sejarawan Indonesia berikutnya sudah mulai berbeda gaya penulisannya dibandingkan dengan generasi pertama, penulisan sejarah yang didasarkan pada prinsip indonesiasentris itu tetap saja masih menempatkan para pahlawan dan kekuasaan kolonial sebagai titik utama pembahasan. Buku Sagimun MD tentang Pahlawan Diponegoro misalnya, tidak memiliki perbedaan yang berarti dalam penonjolan prinsip keindonesian yang sangat berlebihan dalam retorika yang digunakan dibandingkan dengan buku M. Yamin dan Soekanto sehingga sangat terasa adanya rekayasa intelektual yang disengaja oleh penulis untuk membenarkan aksi yang dilakukan oleh sang tokoh. Kalimat-kalimat seperti "secara pengecut dan tidak jujur Belanda merampas senjata", "pertempuran-pertempuran sengit berlangsung juga di beberapa tempat antara pasukan rakyat yang membela hak dan kemerdekaannya melawan pasukan kolonial Belanda yang mempertahankan kemerdekaannya", atau "pahlawan yang cakap dan gagah berani" dapat dengan mudah ditemukan dalam buku-buku sejarah Indonesia. Oleh karena itu, keberadaan politik pecah belah atau *devide et impera*, secara umum tetap saja hanya dilihat sebagai keinginan pemerintah Hindia Belanda memperluas dan mempertahankan kekuasaannya, tanpa menyadari bahwa hal itu juga merupakan bagian dari keberlanjutan konflik internal yang telah ada sejak lama.

Sartono Kartodirdjo melalui studinya tentang pemberontakan petani Banten sebenarnya mulai mengalihkan sejarah Indonesia dari kajian yang hanya membahas tentang penguasa kolonial atau kerajaan menjadi pembahasan tentang masyarakat kebanyakan. Sartono juga mulai beralih dari tradisi penulisan sejarah yang berdasarkan filologi ke arah penulisan dengan pendekatan ilmu-ilmu sosial. Sejarah struktural atau penulisan sejarah dengan pendekatan multidimensional menjadi ciri penting perkembangan historiografi Indonesia selanjutnya. Akan tetapi, kehadiran historiografi yang didasarkan pada pedekatan ilmu-ilmu sosial yang multidimensional itu, ternyata tetap juga belum mampu menyingkirkan kecenderungan rekonstruksi sejarah yang hanya menghujat kekuasaan kolonial atau memfokuskan diri pada peristiwa di sekitar kolonialisme.

Menurut Kuntowijoyo, historiografi dengan pendekatan ilmu-ilmu sosial itu hanya hidup di menara gading sehingga kebenaran ilmiah dari rekonstruksi sejarah hanya ada di kalangan kelompok tertentu, yaitu para sejarawan di perguruan-perguruan tinggi. Berbeda dengan Kuntowijoyo yang lebih melihat problematik historiografi yang dikembangkan oleh Sartono Kartodirdjo itu dalam konteks tidak adanya pengaruh intelektual terhadap kecenderungan umum penulisan sejarah Indonesia, beberapa kajian yang lebih kritis terhadap karya-karya sejarah yang menggunakan pendekatan ilmu-ilmu sosial ternyata menemukan adanya kecenderungan bahwa tradisi baru itu masih tetap menempatkan sejarah Indonesia dalam pola pikir lama yang sangat menyederhanakan proses sejarah. Seperti telah disebutkan di atas, berbagai kajian yang berlabel multidimensional itu pun masih tetap memfokuskan ekplanasi historis sejarah Indonesia di sekitar kolonialisme sehingga menafikan bukti-bukti empirik tentang adanya independensi kausalitas yang menempatkan sejarah sebagai sebuah proses yang sebenarnya terjadi di sekitar masyarakatnya, padahal sebagai sebuah proses historis, sejarah pada masa kolonial tidak selalu identik dengan kekuasaan kolonial karena sejarah yang terjadi merupakan hasil dari interrelasi antarberbagai elemen yang ada pada waktu itu. Kekuasaan kolonial pada prinsipnya hanya merupakan satu dari berbagai elemen yang menjadi bagian dari proses sejarah pada waktu itu.

Persoalan tentang masih diteruskannnya pembahasan yang memfokuskan pada kekuasaan kolonial daripada masyarakatnya pada rekonstruksi sejarah Indonesia pada periode kolonial misalnya, dapat dilihat lebih jauh pada banyak karya sejarawan akademik yang menjadi skripsi S1, tesis S2, disertasi S3, dan publikasi-publikasi ilmiah lainnya. Sebuah tesis S2 yang membahas perubahan sosial di Cianjur pascapelaksanaan sistem Tanam Paksa sebagai contoh, lebih banyak mempermasalahkan bagaimana dampak perkembangan perkebunan milik pemodal swasta asing daripada membicarakan bagaimana perkembangan penanaman atau perdagangan kopi rakyat setelah kewajiban tanam paksa dihapus. Sebagai sebuah realitas sejarah, penduduk sudah menanam kopi pada masa tanam paksa. Setelah sistem itu dihentikan, sebenarnya perlu dibahas apa yang terjadi dengan kebun kopi rakyat itu. Namun, tulisan ini dalam kenyatannya lebih mementingkan pertumbuhan pemukiman orang Eropa dan pasanggrahannya dibandingkan dengan pertumbuhan rumah-rumah singgah dan warung milik penduduk seiring dengan perluasan aktivitas ekonomi dan mobilitas horizontal penduduk bumiputera pada waktu itu.

Hal serupa dapat dilihat pada tesis yang membahas perubahan sosial di Kerinci pada periode yang hampir sama. Aktivitas sosial dan ekonomi penduduk setempat dapat dikatakan hanya berfungsi sebagai tambahan dari aktivitas pemerintah kolonial dan pemodal swasta asing. Kenyataan itu tentu saja menimbulkan pertanyaan, adakah perbedaan prinsipil dengan karya-karya sebelumnya yang dikategorikan sebagai hasil historiografi kolonialsentris karena dalam kenyataannya keberadaan orang Indonesia di dalam proses historis itu tetap saja hanya sekedar sebagai pelengkap dari aktivitas orang Barat atau pemerintah kolonial yang lebih luas. Dalam kata-kata yang lain, historiografi indonesiasentris yang dipraktekkan oleh sebagian besar sejarawan Indonesia pada prinsipnya memiliki premis dasar yang tidak berbeda secara metodo-

logis jika dibandingkan dengan historiografi kolonial.

Sementara itu, tesis yang lain tetap terjebak pada pola pikir yang secara umum dikembangkan dalam tradisi kolonialsentris tentang ciri penduduk bumiputera yang malas atau pembangkang. Akibatnya, beberapa tesis yang membahas dinamika ekonomi lokal tidak dapat menjelaskan secara rasional persoalan kemiskinan, respons penduduk yang rasional terhadap kesempatan ekonomi, atau persoalan tenaga kerja.

Hal di atas tergambar secara jelas pada tesis tentang beras di Sumatera Barat, yang hanya melihat aktivitas penduduk dalam ekspansi penanaman padi dalam konteks kebijakan pemerintah kolonial, padahal jauh sebelum perluasan pengaruh kolonial di wilayah ini, penduduk Sumatera Barat di pusat-pusat penghasil beras telah secara sadar melakukan perluasan penanaman padi atas inisiatif sendiri. Oleh sebab itu, tidak mengherankan, jika hampir sebagian besar tesis yang mencakup masa kolonial terdapat bab yang membicarakan tindakan atau kebijakan pemerintah kolonial yang mempengaruhi masyarakat, namun melupakan dinamika internal masyarakat itu sendiri. Selain itu, tesis yang lain secara naif menyimpulkan bahwa tidak ada orang Minang yang menjadi buruh tambang di Ombilin, dan orang Minang tidak bersedia bekerja sebagai buruh karena hal itu tidak sesuai dengan nilai sosio-kultural mereka yang tidak mau diperintah, padahal realitas empiris menunjukkan bahwa banyak orang Minang yang bekerja sebagai buruh di tambang-tambang emas di kawasan Rejang dan Lebong, atau sebagai buruh pemetik kopi dan lada atau penyadap karet di Karesidenan Bengkulu, Lampung, Jambi dan Palembang. Bahkan di Sawahlunto pun, sebenarnya terdapat banyak orang Minang dari daerah lain yang bekerja di tambang batubara itu. Jika realitas historisnya memang tidak ada atau sedikit orang Minang yang bersedia menjadi buruh upahan, hal itu dapat juga dihubungkan dengan tersedianya sumber ekonomi alternatif pada penduduk setempat di saat yang sama.

Karya lain yang membahas "perbanditan" di darat dan di laut, juga terjebak dalam alur yang hampir serupa. Biarpun tidak bisa dipungkiri bahwa karya-karya itu telah mampu memberikan kontribusi yang sangat besar dalam pembahasan tentang dinamika internal masyarakat di tengah-tengah intervensi kolonial yang semakin luas dan dalam, adanya penokohan yang sangat kuat terhadap para bajak laut dan bandit sebagai pahlawan karena aktivitas mereka yang banyak merugikan pemerintah kolonial dan relasinya, dapat dengan mudah dianggap sebagai penyederhanaan terhadap persoalan sebenarnya atau proses sejarah. Akibatnya, ada kesan yang sangat kuat bahwa para bandit itu tidak dapat dihubungkan dengan kriminal karena aktivitas mereka dipahami sebagai representasi dari "nasionalisme Indonesia" atau reaksi terhadap kekuasaan kolonial dalam arti politis, padahal dalam kenyataan sejarah dan sosiologis, selalu saja ada kriminal yang sebenarnya, baik karena alasan sosial, psikologis maupun ekonomis.

Persoalan lain yang mengikuti pola pemahaman sejarah seperti yang telah digambarkan di atas menyebabkan sejarah Indonesia mengingkari adanya keragaman, perbedaan, dan konflik di dalam masyarakat tanpa harus mengaitkannya dengan kekuasaan kolonial, padahal sebagai sebuah struktur dan proses, sejarah perluasan kolonialisme tidak terlepas dari interaksi faktor-faktor eksternal dan internal. Hal itulah yang menyebabkan para sejarawan Indonesia membaca buku Max Havelaar dengan cara pandang yang salah. Segala sesuatu yang tertulis di dalam novel Max Havelaar dianggap sebagai kritik terhadap kolonialisme, khususnya penanaman dan penyerahan wajib, padahal sebenarnya novel itu juga banyak menggambarkan realitas kekejaman para elite lokal daripada sekedar persoalan eksploitasi kolonial, seperti yang tergambar pada episode "Saijah dan Adinda". Oleh sebab itu, C. Fasseur berpendapat bahwa novel Max Havelaar sangat berpengaruh terhadap tidak adanya kepercayaan pemerintah kolonial untuk menyerahkan birokrasi kolonial kepada penduduk bumiputera, biarpun sebagian dari mereka telah dididik secara khusus melalui pendidikan Barat untuk menjadi birokrat modern.

Masih adanya dominasi kolonial dalam historiografi Indonesia pascakolonial dapat dilihat lebih jauh dalam kajian-kajian Sar-

tono Kartodirdjo. Dalam kajiannya tentang pemberontakan petani Banten misalnya, Sartono yang melihat prinsip-prinsip ratu adil, revivalisme, atau millenarianisme sebagai dasar dari pergerakan sosial di pedesaan Jawa Barat, dalam beberapa hal terjebak pada determinisme eksploitasi ekonomi kolonial tanpa terlebih dahulu melihat secara kritis bagaimana kondisi ekonomi masyarakat saat itu, baik secara kualitatif maupun kuantitatif biarpun Sartono menyadari betul bahwa ekonomi bukan merupakan faktor utama terjadinya peristiwa tersebut. Beberapa bukti bahkan menunjukkan bahwa pada tahun 1888 di daerah Banten sedang terjadi pertumbuhan ekonomi yang baik dan peningkatan produksi pangan setelah mengalami bencana meletusnya Gunung Krakatau lima tahun sebelumnya. Keterlibatan para haji yang sangat penting dalam pemberontakan itu menunjukkan bahwa persoalan sebenarnya tidak hanya sekedar eksploitasi ekonomi kolonial, melainkan sebuah konflik atau persaingan horizontal yang melibatkan kelompok sosial lain di dalam masyarakat setempat, tentu saja tanpa mengesampingkan adanya pengaruh intervensi kekuasaan kolonial yang semakin dalam dan luas.

Pendekatan yang sama terus digunakan Sartono ketika ia membahas berbagai pergerakan sosial lain di pedesaan Jawa, yang mengesampingkan dinamika internal di dalam masyarakat itu sendiri. Seperti kebanyakan para romantis, Sartono tampaknya percaya bahwa pedesaan merupakan representasi dari kedamaian dan keteraturan. Tidak mengherankan jika Sartono tetap memandang bahwa pendapat yang mengatakan adanya pemerasan oleh bupati terhadap rakyat sebagai pendapat yang tidak memahami struktur birokrasi patrimonial yang berlaku di dalam masyarakat. Penyerahan kepada elite lokal dianggap Sartono memiliki arti yang berbeda dengan penyerahan wajib yang diberlakukan VOC atau pemerintah Hindia Belanda karena yang pertama merupakan kewajiban dalam konteks kekeluargaan, sedangkan yang kedua merupakan bentuk dari eksploitasi negara atau institusi, padahal penelitian lain menunjukkan secara jelas bahwa pergolakan internal pedesaan merupakan faktor penting untuk memahami perubahan yang terjadi dalam sejarah pedesaan itu sendiri, dan sangat sulit untuk memungkiri tidak adanya tradisi ekploitatif yang melekat pada penguasa lokal. Berdasarkan referensi yang ada dapat diketahui bahwa apa yang dilakukan oleh VOC dan pemerintah Hindia Belanda tidak lain merupakan kelanjutan dari tradisi yang telah ada sebelumnya di dalam masyarakat setempat.

Keterjebakan historiografi indonesiasentris dalam determinisme kolonial ini juga terlihat dalam pemahaman tentang perlawanan para Paderi di Sumatera Barat pada paruh pertama abad XIX dan konflik antara ulama dan ulebalang di Aceh. Historiografi Indonesia pascakolonial memahami Perang Paderi dalam dimensi penjelasan historis yang berkaitan dengan konflik keagamaan dan adat yang melibatkan kelompok adat, ulama, dan kekuasaan kolonial. Dalam penjelasan dikotomis yang sangat simplistik, historiografi Indonesia menempatkan kaum adat yang didukung oleh kekuasaan kolonial berperang dengan kaum paderi yang mencoba mempertahankan eksistensi kekuasaan sosial, kultural, dan politik setempat dari eksploitasi kolonial. Banyak hal yang dilupakan seperti yang tergambar dalam tulisan Christin Dobbin, ranah Minangkabau pada waktu itu merupakan wilayah yang sedang mengalami pertumbuhan ekonomi yang sangat pesat melalui produksi dan perdagangan beras dan kopi. Bonjol yang merupakan salah satu pusat perlawanan para ulama merupakan daerah yang makmur, yang memungkinkan para penduduknya membangun benteng dan menyediakan peralatan perang yang cukup. Narasi faktual yang dipahami saat ini menunjukkan bahwa faktor-faktor penyebab Perang Paderi tidak sekedar minum tuak, judi, sabung ayam, atau eksploitasi kolonial, melainkan sebuah produk dari rivalitas sosial, ekonomi, kultural, dan bahkan politik antara dua kelompok sosial yang berbeda di dalam masyarakat Minangkabau sendiri dengan atau tanpa adanya kolonialisme Belanda.

Cara berpikir yang serupa dapat juga digunakan untuk menjelaskan sejarah Aceh. Penelitian yang dilakukan oleh Gade Ismail di Aceh Timur menunjukkan dengan jelas adanya persaingan terus-menerus antara ulama dan ulebalang dalam produksi dan

perdagangan lada, jauh di luar persoalan intervensi kekuasaan kolonial. Oleh sebab itu, persitiwa perang Aceh tidak dapat dipisahkan begitu saja dari kelanjutan proses dinamika internal masyarakat Aceh sendiri, biarpun penjelasan historis selama ini menempatkan secara dikotomis antara ulebalang yang memihak Belanda atau bagian dari birokrasi kolonial dan ulama yang nasionalis atau antibirokrasi modern. Beberapa bukti akhir-akhir ini menunjukkan bahwa ulama sebagai kelas sosial tidak begitu saja terbebas dari birokrasi kolonial, ketika pendidikan Barat mulai diperkenalkan di daerah ini. Biarpun lebih banyak mereka yang berlatar belakang sosial ulebalang yang pergi ke sekolah-sekolah Barat, pembukaan sekolah-sekolah model Barat oleh organisasi nasionalis dan Islam serta rasionalisasi sistem birokrasi kolonial membuka kesempatan terjadinya perubahan struktural dalam pekerjaan dan perekrutan. Sebagai kelompok sosial tersendiri, ulama mulai bersaing dalam ruang yang secara tradisional merupakan hak para ulebalang. Oleh sebab itu, konflik antarkelompok sosial yang berbeda telah menciptakan ruang yang baru yang cenderung menjadi berkepanjangan. Hal yang sama tampaknya dapat digunakan untuk menjelaskan salah satu sebab dari disintegrasi sosial dan konflik di Aceh sejak berlangsungnya proses *golkarisasi* pada masa Orde Baru sampai saat ini.

Namun, menurut Kuntowijoyo, prinsip *autonomous history* yang diungkapkan oleh John Smail, yang menjadi dasar untuk menjelaskan dua kasus di atas, tidak dapat digunakan untuk semua persitiwa yang terjadi pada masa kolonial karena hal itu akan mereduksi realitas sejarah dari peristiwa seperti Sistem Tanam Paksa, kebijakan liberal, dan politik etis. Pernyataan itu tentu saja tidak seluruhnya salah. Akan tetapi, satu hal yang perlu dicatat bahwa sebagai sebuah proses sejarah, masa lalu yang berkaitan dengan pelaksanaan Sistem Tanam Paksa misalnya tidak dapat digeneralisasi sebagai satu peristiwa linier yang hanya melibatkan kolonial sebagai kekuasaan politik semata-mata, seperti yang telah digambarkan dengan baik oleh Robert Elson.

Dalam kenyataannya, eksploitasi bukan satu-satunya fenomena yang ada dalam sejarah pada masa dijalankannya Sistem Tanam Paksa. Hal itu berarti bahwa konsep *indegenous dynamic* harus dipahami secara luas, yaitu mencakup seluruh masyarakat yang terlibat pada masa itu tanpa perlu membedakannya secara etnik. Oleh sebab itu, dari masa Sistem Tanam Paksa dapat ditemukan realitas historis yang lebih beragam, seperti tentang adanya keterlibatan modal swasta dalam pelaksanaan sistem itu, nepotisme dan korupsi yang dilakukan oleh para birokrat Hindia Belanda, keuntungan ekonomis besar yang dinikmati para *broker* bumiputera termasuk para elite lokal seperti bupati dan lurah sehingga mereka menjadi kaya raya, kemampuan penduduk pedesaan merespons secara positif kesempatan ekonomi baru, strategi penduduk menciptakan peluang-peluang sosial dan ekonomi untuk sekedar bertahan dari tekanan kemiskinan, di samping tentu saja eksploitasi seperti yang telah banyak dibicarakan selama ini.

Ketika sebuah reinterpretasi lain terhadap realitas masa lalu dilakukan, historiografi Indonesia pascakolonial ternyata tidak semakin mendekat pada kenyataan sejarah, malah sebaliknya semakin terjebak dalam kerangka berpikir yang ultranasionalistik. Persoalan yang dihadapi bukan hanya sekedar kesalahan karena menempatkan Sultan Hassanuddin, Sultan Agung, Pangeran Diponegoro, atau Teuku Umar sebagai pahlawan nasional yang berjuang melawan Belanda, namun memahami peristiwa itu sebagai bagian dari proses perjuangan nasionalisme Indonesia telah menyebabkan terdapat banyak anakronisme dalam rekonstruksi sejarah Indonesia. Kesalahan interpretasi ini menjadi semakin luas, ketika A.B. Lapian dan Suhartono seperti telah disebutkan di atas menempatkan bajak laut dan bandit pedesaan sebagai bagian dari proses perlawanan terhadap kekuasaan kolonial. Walaupun tidak bisa dipungkiri bahwa proses marginalisasi terhadap penduduk setempat sebagai akibat dari perluasan kekuasaan kolonial telah menimbulkan berbagai bentuk perlawanan, sebagai realitas masa lalu tidak semua bajak laut dan bandit pedesaan itu adalah "musuh" penguasa kolonial. Para bajak laut dan bandit pedesaan itu merompak siapa saja, tidak hanya mereka yang berhubungan dengan kekuasaan kolonial. Bahkan, sebagian dari mereka be-

kerja untuk penguasa kolonial. Hal itu menunjukkan adanya beragam realitas sosial pada masa lalu dalam konteks ini, yaitu para kriminal, mereka yang merepresentasi perlawanan terhadap kekuasaan kolonial, dan mereka yang menjadi bagian dari kekuasaan itu sendiri. Ironisnya, historiografi Indonesia pascakolonial tidak menyadari hal itu sehingga realitas objektif dari masa lalu tertutup oleh ideologisasi naratif yang hanya didasarkan pada wacana dan pengalaman yang sesuai dengan kekinian, yang tentu saja sangat politis.

Historiografi Indonesia pascakolonial juga terlalu menitikberatkan pada penjelasan politik dan peran penting yang selalu dimainkan oleh orang besar dalam kejadian sejarah. Kecuali beberapa kajian tentang gerakan petani, sejarah Indonesia yang ditulis sebagian besar hanya berkisar pada kekuasaan dan negara sehingga sejarah menjadi sangat formal. Orang besar sebagai individu selalu dianggap sebagai inti dalam setiap peristiwa, bukan masyarakat. Akibatnya, mencari *dalang* dan *kambing hitam* menjadi sangat penting dalam memahami unsur siapa dalam sebuah peristiwa sejarah. Sementara itu, dalam konteks ekonomi secara umum, historiografi Indonesia pascakolonial juga sama seperti historiografi kolonial telah gagal merekam kehidupan ekonomi penduduk sehari-hari. Seperti telah disebutkan di atas, hampir seluruh penjelasan tentang sejarah ekonomi Indonesia didasarkan pada pemikiran tentang adanya eksploitasi kolonial. Akibatnya, kemampuan penduduk bumiputera merespons munculnya kesempatan ekonomi baru misalnya, sama sekali tidak pernah mendapat tempat dalam penulisan sejarah Indonesia. Perkembangan perkebunan rakyat yang berskala kecil dan aktivitas ekonomi *non-farm* atau ekonomi non-formal yang sangat penting bagi ekonomi masyarakat luput dari perhatian historiografi Indonesia pascakolonial.

Seperti juga pada kasus masa Hindu dan Budha, sebagian besar sejarawan Indonesia beralasan bahwa kelangkaan data adalah masalah utama dari tidak adanya rekonstruksi sejarah tentang masyarakat kebanyakan. Akan tetapi, penelitian akhir-akhir ini menunjukkan bahwa pendapat itu tidak benar. Kajian yang dilakukan terhadap beberapa tema seperti karet rakyat di Sumatera Timur dan Sumatera Bagian Selatan, perikanan laut di Sapudi dan Kangean serta pantai utara Jawa, perikanan air tawar di Jawa Barat yang semuanya terjadi pada masa kolonial membuktikan bahwa konteks *socially important* yang melekat pada sejarah Indonesia tidak hanya berhubungan dengan orang besar, peristiwa politik, atau negara melainkan juga pada berbagai kehidupan sehari-hari masyarakat kebanyakan, seperti yang telah digambarkan dengan baik oleh beberapa sejarawan asing. Kepincangan ini agak terobati pada tahun 1990-an, ketika muncul beberapa tulisan lain yang dilakukan sejarawan Indonesia, seperti tentang Serat Cebolek, Sumur Ajaib di Surakarta, dan sepakbola di Jawa pada masa kolonial.

Perempuan baik sebagai objek maupun wacana sejarah merupakan salah satu unsur yang juga hilang dalam historiografi Indonesia pascakolonial. Berkembangnya pengaruh Hindu-Budha, meluasnya pengaruh Islam, perubahan ekonomi yang terjadi sejak paruh pertama abad XIX, atau pengadopsian nilai-nilai Barat ke dalam masyarakat seharusnya tidak hanya berpengaruh terhadap laki-laki melainkan juga kepada perempuan. Namun, narasi maupun penjelasan terhadap masa lalu Indonesia tetap hanya berlangsung di sekitar laki-laki. Adanya pemaparan tentang beberapa perempuan yang pernah berkuasa di kerajaan-kerajaan tradisional atau tentang para perempuan yang berperan dalam perkembangan pendidikan masyarakat seperti Kartini dan yang lainnya, tidak menghilangkan kenyataan bahwa secara prosesual sejarah Indonesia hanya melibatkan laki-laki dan secara konseptual berkelamin laki-laki.

Oleh sebab itu, tidak mengherankan bahwa walaupun dalam kenyataannya para perempuan memiliki fungsi yang penting dalam proses perkembangan agama-agama di Indonesia, dalam kenyataannya sangat sulit untuk menemukan rekonstruksi tentang para bikuni dalam tradisi Budha, biarawati dalam tradisi Kristen, atau para nyai di pesantren sebagai realitas sejarah. Jika ada yang menghadirkan perempuan dalam proses sejarah, keberadaan mereka hanya dikaitkan pada beberapa aspek ter-

tentu yang cenderung berkonotasi negatif, seperti pelacuran atau penyakit kelamin. Selain memang adanya realitas sosial bahwa perempuan memiliki posisi yang marginal di dalam masyarakatnya pada masa lalu, telah terjadi juga marginalisasi terhadap kenyataan historis tentang perempuan dalam historiografi Indonesia.

Hilangnya wacana perempuan dalam sejarah Indonesia pascakolonial terlihat dengan jelas pada struktur dan pemaparan isi, baik pada enam jilid buku *Sejarah Nasional Indonesia* yang diterbitkan pemerintah maupun dua jilid buku *Pengantar Sejarah Indonesia Baru* yang ditulis oleh Sartono Kartodirdjo. Baik pada buku pertama maupun pada buku yang kedua, sejak awal sampai akhir dipaparkan berbagai aspek-aspek sejarah. Namun, dua-duanya baik secara sadar maupun tidak telah mengabaikan realitas historis perempuan sebagai bagian dari proses sejarah Indonesia. Seperti yang disampaikan oleh Peter Boomgard misalnya, perubahan struktur ekonomi sejak masa *Cultuurstelsel* telah mendorong lebih banyak perempuan terlibat di dalam aktivitas ekonomi di luar rumah. Akibatnya, pertumbuhan penduduk menjadi tinggi karena tingginya angka kelahiran. Masa subur perempuan usia subur menjadi lebih panjang karena mereka segera memutuskan untuk tidak lagi menyusui anaknya agar dapat ditinggal bekerja di luar rumah. Perubahan itu tentunya akan menimbulkan perubahan lain, paling tidak dalam struktur produksi, pekerjaan, atau hubungan sosial-kekeluargaan di dalam masyarakat. Dalam kenyataannya, keberadaan perempuan dalam proses sejarah itu dapat juga dilihat pada peran mereka sebagai mediator dalam perubahan masyarakatnya, seperti yang dibutkikan oleh sebuah kajian tentang perkembangan pendidikan Barat di masyarakat Batak pada masa kolonial.

Tidak adanya perempuan dalam sejarah Indonesia dapat dilihat lebih jauh dalam kajian perkembangan sosial kota Yogyakarta yang dilakukan oleh Abdurrachman Surjomihardjo. Hampir seluruh isi buku itu memaparkan aktivitas para laki-laki dan melihat kota sebagai dunia laki-laki, padahal kota Yogyakarta merupakan tempat berlangsungnya Kongres Perempuan Pertama dan di kota ini juga diterbitkan banyak majalah yang membahas perempuan, padahal kajian tentang buruh wanita di perkebunan teh di Jawa Barat dan pembantu rumah tangga pada masa kolonial menunjukkan adanya perempuan dalam proses sejarah Indonesia. Khusus berkaitan dengan pembantu rumah tangga, Ann Stoler secara jelas menggambarkan hubungan antara perempuan bumiputera dengan modernisasi masyarakatnya. Apa yang digambarkan oleh Stoller adalah satu hal yang tidak pernah terpikirkan dalam tradisi indonesiasentris, yaitu para perempuan yang menjadi pembantu rumah tangga di keluarga-keluarga Barat dan asing lainnya ternyata memerlukan pendidikan tertentu untuk bisa menjadi pembantu. Mereka tidak selalu terhanyut dengan "kebodohan" selamanya, tanpa mengalami perubahan. Para pembantu perempuan itu ternyata juga yang menjadi agen dari perubahan gaya hidup, termasuk penyebarluasan jenis masakan Barat, Cina, atau Jepang ke dalam masyarakat melalui keluarga atau juga secara komersial.

Di dalam konteks yang lain, ketidakhadiran perempuan itu dapat dilihat dalam pemahaman tentang konsep *priyayi* Jawa. Beberapa simbol seperti burung, keris, kuda, dan wanita yang melambangkan peradaban priayi secara jelas menunjukkan bahwa dunia priayi adalah dunia laki-laki, padahal dari novel *Canting* yang merupakan representasi dari sebuah realitas sosial di Surakarta dapat dilihat adanya dunia priayi perempuan. Para laki-laki yang menjadi saudagar batik, sangat mudah diasosiasikan sebagai seseorang yang hidup dalam dunia kepriayian di samping identitas sosial lainnya sebagai pedagang. Akan tetapi, para perempuan yang berprofesi sama tidak pernah dikaitkan dengan peradaban priayi karena seperti telah disebutkan di atas dunia priayi adalah dunia para lelaki. Tidak mengherankan, jika penyimpangan-penyimpangan perilaku sosial yang berkaitan dengan dunia priayi akhirnya juga hanya melekat pada laki-laki, padahal sumbangan perempuan secara sadar untuk hal yang sama tidak kalah besarnya. Judi dan opium misalnya, dalam sejarah sosial beberapa kelompok masyarakat ternyata juga melibatkan para perempuan. Sementara itu, realitas objektif sejarah In-

donesia juga memiliki bukti bahwa para birokrat bumiputera dan guru di sekolah-sekolah model Barat merupakan bagian dari sejarah para priayi. Akan tetapi, ketika para perempuan mulai terlibat sebagai guru dan kemudian juga birokrat, pemahaman terhadap priayi tetap saja hanya berdimensi laki-laki. Oleh sebab itu, perubahan profesi para perempuan pada komunitas santri pedagang menjadi guru di pusat-pusat perkembangan Muhammadiyah seperti di Kota Gede, Pekalongan, Kudus, atau Kauman tidak pernah dilihat sebagai bagian dari sejarah sosial masyarakatnya.

Ketidakhadiran perempuan dalam historiografi Indonesia pascakolonial ini menjadi semakin lengkap, ketika Darsiti Soeratman yang merupakan salah seorang sejarawan perempuan terkemuka Indonesia menulis *Kehidupan Dunia Keraton Surakarta* antara tahun 1830 dan 1939 hanya memaparkan kehidupan perempuan pada saat mendeskripsikan kehidupan sehari-hari di dalam *keputren*. Selebihnya, narasi yang dibangun tetap berdimensi laki-laki, padahal di dalam buku itu juga digambarkan bagaimana perubahan gaya hidup di dalam kraton sebagai akibat dari masuknya pengaruh Barat, yang sudah pasti melibatkan para perempuan yang menjadi bagian dari proses sejarah kraton Surakarta selama kurang lebih seratus tahun. Seperti juga Darsiti, sejarawan perempuan lain Djuliati Surojo juga tidak banyak memperhatikan persoalan ketimpangan *gender* pada tingkat wacana ketika membahas tenaga kerja pada masa Tanam Paksa di Kedu, padahal dari data yang disajikan secara luas oleh Robert Elson, salah satu interpretasi penting yang dapat dilakukan adalah adanya perubahan penting dalam konteks tenaga kerja perempuan sejak diberlakukannya *Cultuurstelsel*.

Di samping hilangnya perempuan, historiografi Indonesia adalah rekonstruksi dunia orang dewasa yang melupakan keberadaan anak-anak dalam sejarah. Keberadaan anak-anak dalam sejarah tidak pernah dianggap sebagai bagian dari proses sejarah, padahal Anthony Reid membuat sebuah gambaran yang menarik, biarpun pendapatnya itu masih dapat diperdebatkan, bagaimana eksistensi anak menjadi penting dalam memahami perbedaan perkembangan demografi pada masa damai dan masa perang. Menurut pendapat itu, orang tua cenderung menjarangkan jarak kelahiran menunggu sampai anak terkecil dapat berlari sendiri untuk menghindar dari musuh pada masa perang, tetapi mereka tidak menghiraukan hal itu pada masa damai. Di samping itu, pembahasan lain yang menjelaskan usaha masyarakat menghadapi kemiskinan sejak masa *Cultuurstelsel* ternyata dapat dikaitkan dengan anak yang dianggap sebagai modal. Akibatnya, jumlah penduduk bertambah dengan cepat karena setiap keluarga cenderung memiliki anak sebanyak mungkin untuk memproduksi tenaga kerja dalam rangka meningkatkan jumlah pendapatan. Pada saat yang sama, jumlah tenaga kerja anak-anak mengalami peningkatan yang sangat signifikan.

Ketidakberadaan anak-anak dalam proses sejarah ini dapat dilihat lebih jauh dalam pembahasan tentang pendidikan karena hampir seluruh kajian tentang sejarah pendidikan di Indonesia menyajikan pendidikan seolah-olah hanya bagi orang dewasa. Sebagai contoh, siapakah dan berapakah usia yang sebenarnya dari mereka yang masuk ke sekolah desa atau sekolah angka dua pada masa kolonial. Pertanyaan yang serupa dapat ditanyakan kepada mereka yang menjalani pendidikan *Sekolah Dokter Jawa* dan sekolah lainnya, yang sangat jelas belum dapat dipisahkan dari dunia anak-anak ketika para siswa itu memulai pendidikannya. Kenyataannya, historiografi Indonesia menggambarkan para siswa itu seolah-olah sebagai orang dewasa yang siap menjadi juru tulis, mantri, birokrat, atau dokter selama mengikuti pendidikan, bukan anak-anak yang secara perlahan dan alami tumbuh dewasa seiring dengan proses waktu.

Selain itu, identifikasi sosial-kultural dari historiografi Indonesia juga cenderung dipusatkan pada Islam dan melupakan pengaruh lainnya. Akibatnya, sejak kedatangan bangsa Barat ke Indonesia, sebagai contoh, seolah-olah hanya terjadi proses kristenisasi, sedangkan proses islamisasi telah berakhir pada abad-abad sebelumnya, padahal banyak bukti yang menunjukkan bahwa proses islamisasi di banyak wilayah di Indonesia berlangsung seiring dengan proses perluasan kekuasaan VOC dan kemudian pemerintah Hindia Belanda. Secara

historis juga dapat dibuktikan bahwa Islam diterima oleh masyarakat bukan karena alasan teologis semata-mata melainkan juga karena alasan politis. Islam menjadi ideologi alternatif terhadap kolonialisme, bukan terhadap Kristen. Dasar berpikir seperti itu juga menimbulkan marginalisasi terhadap unsur Cina dalam proses sejarah Indonesia karena Islam dan Cina diibaratkan seperti air dan minyak yang tidak mungkin bercampur, padahal banyak bukti yang menunjukkan bahwa sebagai realitas objektif sejarah Islam di Indonesia berhubungan erat dengan unsur-unsur Cina. Adanya keterkaitan unsur Cina itu akan menjadi lebih jelas jika dikaitkan dengan proses sejarah masyarakat secara lebih luas lagi.

3. Mencari Format Baru Historiografi Indonesiasentris

Berdasarkan paparan di atas, ditemukan beberapa paradok ketika mencoba mencari akar historisisme baru dalam historiografi Indonesia pascakolonial. Berbeda dengan pemahaman teoretik yang menyatakan bahwa historiografi pascakolonial berkaitan erat dengan tradisi historis posmodernisme, historiografi Indonesia pascakolonial dalam banyak hal ternyata tidak mampu memunculkan sikap kritis terhadap pola berpikir historiografi yang lama. Persoalan yang dihadapi tidak hanya sekedar karena historiografi indonesiasentris berkembang bersamaan dengan tradisi pendekatan ilmu-ilmu sosial yang didasarkan pada tradisi empirik dalam penelitian sejarah, namun lebih banyak disebabkan ketidakmampuan memahami secara kritis perbedaan antara sejarah sebagai sebuah realitas objektif masa lalu dengan sejarah sebagai sebuah hasil proses intelektual kekinian.

Keberadaan historiografi Indonesia pascakolonial seperti yang telah dijelaskan di atas, tidak terlepas dari pemahaman teoretik tentang apa yang tercakup sebagai fakta sejarah. Sebagai sebuah peristiwa, sejarah hanya dikaitkan dengan sesuatu yang *socially significant*. Bagi peristiwa yang dianggap tidak memiliki arti penting secara sosial, yang tentu saja berkaitan dengan kehidupan sehari-hari masyarakat, terutama masyarakat kebanyakan, maka tidak ada sejarah. Oleh sebab itu, biarpun Sartono telah memulai sebuah tradisi yang mengangkat para petani sebagai bagian dari proses sejarah Indonesia, dalam perkembangannya historiografi Indonesia pascakolonial tetap lebih suka melakukan reinterpretasi terhadap kekuasaan kolonial daripada memahami proses dan struktur sejarah masyarakatnya.

Akibatnya, tidak mengherankan jika narasi historis tentang kehidupan sehari-hari dalam sejarah Indonesia tidak datang dari sejarawan Indonesia, melainkan sebagian besar ditulis oleh sejarawan asing, seperti yang dilakukan oleh John Ingleson dan William Frederick terhadap buruh pelabuhan, prostitusi, serta kehidupan sehari-hari di kampung pada masa depresi tahun 1930-an, atau Ann Stoler yang menulis para *house maids* pada masa kolonial. Cara berpikir yang sama pula yang telah membatasi sejarawan Indonesia memahami sejarah tentang pergerakan nasional Indonesia. Nasionalisme Indonesia selalu dipahami sebagai sesuatu yang hanya berdimensi politis, seperti partai politik, padahal perkembangan nasionalisme Indonesia dapat diperbincangkan dengan realitas-realitas sosial masyarakat seperti ironi simbolisme yang berkaitan dengan gaya hidup bumiputera. Ketika perjuangan pergerakan nasional Indonesia memperjuangkan identitas nasional sebagai lawan dari kolonial dan imperialisme Barat sebagai contoh, pada saat yang sama para elite dan masyarakat mengadopsi berbagai simbol Barat yang diartikan para nasionalis sebagai simbol modernisasi, padahal dalam kenyataannya, simbol itu identik dengang kolonialisme dan imperialisme Barat. Sementara itu, biarpun tidak bisa dinafikan bahwa beberapa karya seperti yang ditulis oleh Taufik Abdullah tentang Minangkabau, Kuntowijoyo tentang Madura, Djoko Suryo tentang Semarang, Muhlis Paeni tentang Gayo, dan sejarawan lainnya telah memberikan sumbangan yang besar untuk memahami dinamika historis masing-masing masyarakat yang menjadi pokok bahasan. Persoalannya adalah apa yang telah dilakukan oleh beberapa sejarawan akademis Indonesia itu tidak menggambarkan benang merah dari sebagian besar karya sejarawan Indonesia yang sampai kepada

masyarakat luas dan pemahaman orang Indonesia terhadap historiografi Indonesia.

Di samping itu, tradisi historiografi Indonesia juga tidak pernah menyadari bahwa sesuatu "yang tidak terjadi" dalam suatu kurun waktu tertentu juga adalah bagian dari proses sejarah. Ketidakhadiran sesuatu di dalam teks dokumentasi tidak pernah dipahami sebagai hal yang menyejarah. Tidak terjadinya industrialisasi di Indonesia pada masa kolonial sebagai contoh, tidak pernah dilihat sebagai bagian dari sebuah proses historis dari perkembangan ekonomi. Oleh sebab itu, tidak mengherankan jika tema seperti hilangnya kesempatan Indonesia melakukan industrialisasi pada abad XIX tidak ditulis oleh sejarawan Indonesia melainkan oleh sejarawan asing. Oleh sebab itu, telah menjadi sebuah kenyataan sejarah bahwa historiografi Indonesia sampai saat ini lebih terpaku pada tema-tema sekitar eksploitasi tanah dan tenaga kerja pada masa diberlakukannya sistem tanam paksa atau perjuangan bersenjata mempertahankan kemerdekaan, daripada bagaimana proses sosialisasi keluarga atau kehidupan sosial perempuan pada masa tanam paksa dan revolusi.

Biarpun di dalam ilmu sejarah dikenal generalisasi sejarah, pemahaman terhadap peristiwa sejarah tidak didasarkan dan bertujuan menggeneralisasi seluruh fakta sejarah. Oleh sebab itu, misalnya, perkembangan kolonialisme Belanda di Indonesia tidak dapat hanya dipahami secara umum dalam konteks politik *devide et impera* atau eksploitasi. Sebagai sebuah proses sejarah, kolonialisme Belanda merupakan produk dari interaksi berbagai faktor internal dan eksternal yang akhirnya membentuk sebuah struktur tertentu. Selain itu, sebagai sebuah proses sejarah, Islam di Indonesia tidak hanya berkaitan dengan unsur teologis melainkan juga berkaitan dengan unsur sosial, kultural, politik, atau ekonomi. Tidak semua hal yang berhubungan dengan Islam pada masa lalu dapat dikembalikan pada persoalan teologis. Misalnya, biarpun Islam melarang orang melakukan praktek riba, terdapat banyak bukti sejarah yang menunjukkan bahwa para haji melakukan praktek peminjaman uang dengan bunga yang tinggi, seperti yang banyak terjadi di sepanjang pantai utara Jawa. Sejarah adalah kenyataan dan objektif, tetapi rekonstruksi tentang masa lalu sampai kapan pun tidak akan terbebas dari nilai subjektif, tergantung pada kemampuan menyejarahkan wacana dan pengalaman yang menjadi dasar sebuah naratif.

Berdasarkan pengalaman perkembangan historiografi Indonesia yang telah disampaikan di atas, historisisme baru, sama seperti tradisi empirik, bukan sesuatu yang perlu ditakutkan. Meminjam istilah Alun Manslow, yang paling penting adalah adanya kesadaran dekonstruktif untuk merekonstruksi masa lalu yang tetap didasarkan pada fakta. Dalam kenyataannya, sejarah sebagai realitas objektif telah berjarak dengan sejarah yang dipahami saat ini sehingga tidak mungkin dihidupkan kembali seperti apa yang terjadi pada masa lalu. Sementara itu, sejarah sebagai naratif juga tidak akan dapat dibangun jika tidak terdapat sejarah sebagai realitas objektif masa lalu.

Harus disadari bahwa biarpun metode dan metodologi sejarah modern mendapat dasar yang sangat kuat dari Leopold von Ranke, tidak semua prinsip dasarnya yang menekankan pada masa lalu berbicara sendiri tentang dirinya dengan mengumpulkan informasi sebanyak mungkin, dalam arti sekedar rekonstruksi faktual, dijalankan selama ini oleh para sejarawan, termasuk mereka yang menentang wacana dekonstruktif. Pengggunaan konsep dan teori-teori ilmu sosial - yang beberapa di antaranya hanya hasil generalisasi dan tidak historis - dalam analisis dan sistesis sejarah, sebenarnya juga merupakan sebuah bentuk dari penisbian terhadap fakta. Banyak eksplanasi yang dilakukan untuk merangkai fakta-fakta masa lalu menjadi sebuah deskripsi historis harus diakui hanya merupakan spekulasi konseptual dan teoretik, yang sebagian darinya bahkan tidak memiliki basis sama sekali pada realitas sejarah sebagai peristiwa objektif.

Oleh sebab itu, sudah saatnya para sejarawan Indonesia bangun dari tidur lelap yang panjang untuk mencoba merumuskan kembali prinsip-prinsip dasar historiografi Indonesiasentris, tanpa perlu takut terhadap perkembangan pemikiran pascamodernisme dan menentang wacana dekonstruksi secara membabi buta. Para sejarawan di

perguruan tinggi perlu memberikan wawasan, substansi baru, dan pertanyaan-pertanyaan baru melalui pembenahan terhadap kurikulum yang telah digunakan selama ini sehingga para sejarawan yang dihasilkannya mampu memahami masa kini dan masa depan masyarakatnya melalui rekonstruksi masa lalu yang mendekati sejarah objektif. Atau dalam bahasa Kuntowijoyo, menjadikan sejarah sebagai kritik sosial sehingga sejarah sebagai sebuah rekonstruksi dan sejarawannya tidak hanya sekedar menjadi alat pembenar dan menara gading, atau hanya mampu berdialog dengan dirinya sendiri.

Akhirnya, mengutip Sartono Kartodirdjo, "sejarah nasional adalah simbol dari identitas nasional yang secara logis akan sangat mudah terjerumus pada egosentrisme dan kecenderungan yang memihak". Hal itu telah terbukti pada sebagian besar tulisan sejarah yang dilabelkan dengan pendekatan indonesiasentris selama ini. Namun, hal itu bukan berarti bahwa historiografi yang didasarkan pada indonesiasentris tidak mampu menghasilkan karya sejarah Indonesia yang berkadar subjektivitas rendah. Kata kuncinya adalah para sejarawan Indonesia harus berani dan mampu mendekonstruksi secara rasional wacana dasar dari historiografi yang ada sekarang, sebagai salah satu langkah untuk memperkaya metodologi yang telah ada atau merumuskan sebuah metodologi alternatif yang mampu merekonstruksi masa lalu Indonesia mendekati peristiwa objektif.

DAFTAR PUSTAKA

A.B. Lapian, "Orang Laut-Bajak Laut-Raja Laut: Sejarah Kawasan Laut Sulawesi Pada Abad XIX", Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 1987.

Abdurrachman Surjomihardjo, *Sejarah Perkembangan Sosial Kota Yogyakarta.* Yogyakarta: Yayasan untuk Indonesia, 2000.

A.M. Djuliati Suroyo, *Eksploitasi Kolonial Abad XIX. Kerja Wajib di Keresidenan Kedu 1800-1890.* Yogyakarta: YUI, 2001

Attridge, Derek, *et al.*, eds., *Post-structuralism and the Question of History.* Cambridge: Cambridge University Press, 1991.

Darsiti Soeratman, *Kehidupan Dunia Kraton Surakarta 1830-1939.* Yogyakarta: Yayasan Untuk Indonesia, 2000.

Djohar Noor "Perubahan Sosial di Kerinci pada Awal Abad XX", Yogyakarta: Program Pascasarjana UGM, 1985.

Ebert, T., "The Dialectics of History: New Historicism, Textuality, Class", *http://-www.albany.edu/-te609/eng641/*, 21 August 2000.

Elson, R.E., *Village Java under the Cultivation System 1830-1870*, Sydney: Allen & Unwin, 1994.

Goldstein, Jan, ed., *Foucault and the Writing of History.* Oxford: Blackwell, 1995.

Hamilton, Paul, *Historicism.* London: Routledge, 1996.

Harpham, G. G., "History v. Interpretation", *http://www.ruf.rice.edu/culture/papers.HARPHAM.html*, 27 August 2000.

Hobsbawm, Eric, *On History.* London: Abacus, 1999.

Iggers, Georg G., *Historiography in the Twentieth Century.* Hanover: Weslayan University Press, 1997.

Kuntowijoyo, *Paradigma Islam. Interpretasi Untuk Aksi.* Bandung: Penerbit Mizan, 1991.

———, *Radikalisasi Petani.* Yogyakarta: Bentang, 1994

———, "Indonesian Historiography In-search of Identity", *Humaniora*, No.1, 2000.

Laslett, Barbara, et al., eds., *History and Theory. Feminist Research, Debate and Contestations*. Chicago: University of Chicago Press, 1997.

M. Gade Ismail, "Seuneubok Lada, Uleebalang, dan Kumpeni. Perkembangan Sosial Ekonomi di Daerah Batas Aceh Timur, 1890—1942", Leiden: Academisch Proefschrift de Rijksuniversiteit te Leiden, 1991.

M. Yamin, *Sedjarah Perang Dipanegara*. Djakarta: Jajasan Pembangunan, tt.

Munslow, Alun, *Deconstructing History*. London: Routledge, 1997.

Reiza Dienaputra, "Perubahan Sosial di Cianjur, 1816-1942", Yogyakarta: Program Pascasarjana UGM, 1997.

Sabar, "Produksi Beras di Sumatera Barat, 1930-1942", Yogyakarta: Program Pascasarjana UGM, 1998.

Sartono Kartodirdjo, *The Peasants' Revolt of Banten in 1888*. s- Gravenhage: Martinus Nijhoff, 1966.

———, *Pemikiran dan Perkembangan Historiografi Indonesia, Sebuah Alternatif*. Jakarta: Gramedia, 1982.

———, *Pengantar Sejarah Indonesia Baru, vol. 1 & 2*. Jakarta: Gramedia, 1992.

———, *Indonesian Historiography*. Yogyakarta: Kanisius, 2001.

Soekanto, *Sentot Alias Alibasah Abdulmustopo Prawirodirdjo Senopati Diponegoro*. Djakarta: Poesaka Aseli, tt.

Sri Agustina Palupi, "Sepakbola di Jawa, 1920-1942", *Lembaran Sejarah*, Vol.2. No.2, 2000.

Stoler, A.L. & Karen Strassler, "Casting for the Colonial: Memory Work in "New Order Java", *Comparative Studies History and Society*, Vol.42, No.1, January 2000.

Suhartono, *Apanage dan Bekel: Perubahan Sosial di Pedesaan Surakarta, 1830-1930*. Yogyakarta: Tiara Wacana, 1991.

———, *Bandit-bandit Pedesaan di Jawa: Studi Historis 1850-1942*. Yogyakarta: Aditya Media, 1993.

Taufik Abdullah, ed., *Literature and History*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1986.

T. Ibrahim Alfian, *et al*., eds., *Dari Babad dan Hikayat sampai Sejarah Kritis*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1992.

Zaiyardam, "Kehidupan Buruh Tambang Batu Bara Ombilin Sawah Lunto Sumatera Barat, 1891-1927", Yogyakarta: Program Pascasarjana UGM, 1995.